

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH PENYIDIK DI POLRES SOLOK KOTA
(STUDI KASUS : NO. BP/74/XI/2022-RESKRIM)**



DISUSUN OLEH

ANUGRAH DWI SAPUTRA

NIM : 191000474201067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

No. Register : 509/FHUK-UMMY/IX-2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH PENYIDIK DI POLRES SOLOK KOTA**

(STUDI KASUS : NO. BP/74/XI/2022-RESKRIM)

*Nama: Anugrah Dwi Saputra, Npm: 191000474201067, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Rifqi Devi
Lawra, S.H, M.H, Pembimbing II: Dr. Yulia Nizwana S.H, M.H, Tahun: 2023,
Halaman:63.*

ABSTRAK

Pemberian perlindungan terhadap saksi oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan Pasal 112 ayat (1), Pasal 113, Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai hak-hak saksi dalam proses tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota?, 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota (Studi Kasus: No.BP/74/XI/2022-Reskrim)? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Kepolisian Polres Solok Kota dan saksi IG dan saksi F, penelitian ini dilakukan di Polres Solok Kota. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota yaitu: saksi dipanggil oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dan disertai alasan yang jelas, merahasiakan identitas saksi, memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi saksi jika saksi mendapatkan ancaman; tidak membuat saksi satu ruangan dengan tersangka pada saat interogasi, dan memberikan informasi mengenai perkembangan kasus tindak pidana. Serta dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang, karena saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keluarga dan harta benda saksi, serta mendapat tekanan dan pertanyaan yang menjerat ketika interogasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Gomgon T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2011.
- Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Sumber Lainnya

Adriyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 2 Edisi 2, 2014.

Amrin Kamaria, *Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 7 No. 3, Juni 2021.

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol.1 No.1, 2018.

Ismail, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) dalam Perkara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Edisi 1, Vol.4, 2016.

Jony Fauzur Rohmad, dkk, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP untuk Menetapkan Seseorang sebagai Tersangka*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2, Desember 2021.

Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 1 Edisi. 2, Tahun 2013.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.1 Rev 27 Juli 2016.

Martinus Halawa, dkk, *Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020.

Moh. Ismail, *Tinjauan Kriminologis dalam Pembunuhan Berencana di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Vol. 1 Edisi 4, 2013.

Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1, Juni 2017.

Prasetyo Margono, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Unndang Nomor 13 Tahun*

2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Independent, Vol. 5 No. 1, 2020.

Raynaldi Arya Danielli, *Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Pembunuhan di Lingkungan Keluarga*, Jurnal Universitas Atma Jaya, 2016.

Remincel, *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No. 2 Edisi. 2, Januari 2019.

Sonya Airini Batubara, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)*, Jurnal Hukum Kadhah, Vol. 18 No. 2, 2017.

